Journal of Research and Development on Public Policy
Volume 4, Nomor 1 Tahun 2024
e-ISSN: 2962-262X; p-ISSN: 2962-2611, Hal 01-07
DOI: https://doi.org/ 10.58684/jarvic.v4i1.171
Available Online at: https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic

Tantangan dan Peluang Administrasi Publik dalam Membangun Kapasitas Pemerintah Daerah

Amanda Iqlimah [1*], Izah Meitara [2], M. Dio Novaldy [3], Syaparman Syaparman [4]
[1-4] STISIPOL Candradimuka, Indonesia

Alamat: Jalan Swadaya Sekip Ujung Palembang
Korespondensi penulis: amandaiqliam2323@gmail.com *

Abstract*. Since the implementation of decentralization policies through Law No. 22 of 1999 and Law No. 23 of 2014, local governments have been granted broader authority in managing governance affairs. However, the implementation of decentralization faces challenges, particularly the low capacity of local governments in carrying out their functions optimally. This study uses a descriptive qualitative method to explore the challenges and opportunities in enhancing local government capacity. Data was collected through interviews with local government officials, public administration experts, and community leaders, as well as through literature studies. The findings indicate that the use of digital technology through e-government plays a significant role in improving local government capacity by simplifying bureaucracy, increasing transparency, and accelerating data-driven decision-making. However, challenges such as limited technological infrastructure and low digital literacy among civil servants remain major barriers. To address these issues, investments in digital infrastructure, digital literacy training for civil servants, and policies supporting digital transformation are needed. With these strategies, local governments can improve efficiency, transparency, and accountability in public services, while maximizing resources for sustainable development.*

Keywords*:Decentralization, Local Government Capacity, E-Government, Public Services, Digital Technology, Public Administration.*

Abstrak. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan. Namun, implementasi desentralisasi menghadapi tantangan, terutama rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparatur pemerintah daerah, pakar administrasi publik, dan tokoh masyarakat, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui e-government memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, seperti menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital ASN menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi dalam infrastruktur digital, pelatihan literasi digital untuk ASN, dan kebijakan yang mendukung transformasi digital. Dengan strategi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta memaksimalkan potensi sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Desentralisasi, Kapasitas Pemerintah Daerah, E-Government, Pelayanan Publik, Teknologi Digital, Administrasi Publik..

1. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia telah memasuki era baru dalam tata kelola pemerintahan (. & Sahputri, 2023; Mulyani et al., 2024; Salmon & Lekipiouw, 2024). Kebijakan desentralisasi

Received November 19, 2024; Revised November 30, 2024; Accepted Desember 20, 2024; Online Available Desember 23, 2024

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah (Hoesein et al., 2022; Muhtadin, 2023). Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan ("Decentralization in Public Policy and Governance of Public Services in Alaska, USA," 2023; Ilhami et al., 2024).

Namun, dalam implementasinya, desentralisasi menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mencakup sistem birokrasi, tata kelola keuangan, pengelolaan aset, serta mekanisme pengambilan keputusan yang responsif dan akuntabel (Choi, 2021; Setiawan et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh permasalahan klasik seperti keterbatasan anggaran dan budaya birokrasi yang masih cenderung kaku dan lamban dalam merespons perubahan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif (Espiritu et al., 2023). Transformasi digital, misalnya, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi publik. Implementasi e-government, penggunaan big data, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan dapat menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Selain itu, desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola anggaran secara mandiri membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan kapasitas.

Di sisi lain, kolaborasi multi-pihak antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi salah satu peluang strategis dalam memperkuat kapasitas administrasi publik. Kerjasama ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan solusi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, peluang tersebut masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan koordinasi, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak internal birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai tantangan dan peluang administrasi publik dalam membangun kapasitas pemerintah daerah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu proses manajemen dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik, implementasi kebijakan, serta pengelolaan sumber daya negara (Katelo, 2024).

Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pembangunan kapasitas pemerintah daerah dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan organisasi pemerintahan daerah, baik dari segi struktur, sumber daya manusia, maupun proses tata kelola untuk mencapai hasil yang optimal (EDOUN et al., 2023; Suparjana & Suparjana, 2019). Kapasitas pemerintahan melibatkan kemampuan untuk menyusun kebijakan, mengelola sumber daya, dan merespons tuntutan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang administrasi publik dalam membangun kapasitas pemerintah daerah. Data penelitian diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah daerah, pakar administrasi publik, serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan resmi pemerintah, dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini difokuskan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik dan tingkat keberhasilan berbeda dalam pembangunan kapasitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola tantangan

dan peluang yang relevan serta solusi yang aplikatif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital melalui implementasi e-government dan layanan publik berbasis teknologi informasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun kapasitas pemerintah daerah. Teknologi digital membantu menyederhanakan proses birokrasi yang sering kali panjang dan berbelit-belit. Dengan adanya sistem e-government, pelayanan publik dapat dilakukan secara daring sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan administratif. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu, transparansi layanan, dan mengurangi praktik korupsi yang sering terjadi dalam birokrasi tradisional.

E-government juga berperan dalam mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan big data untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara real-time. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran, teknologi informasi memungkinkan pengawasan yang lebih akurat terhadap penggunaan dana publik, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

E-government menjadi solusi untuk mengatasi inefisiensi birokrasi tradisional yang sering kali lamban, berbelit-belit, dan kurang transparan. Dengan penerapan e-government, proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara otomatis, efisien, dan transparan, sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintah kini dapat dilakukan secara daring melalui platform digital, seperti aplikasi berbasis web maupun mobile. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi yang kerap terjadi dalam proses pelayanan manual.

Pemanfaatan big data melalui teknologi digital juga memberikan manfaat signifikan bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Data yang terkumpul secara real-time dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Sebagai contoh, dalam pengelolaan keuangan daerah, teknologi informasi memungkinkan adanya pemantauan yang akurat dan transparan terhadap penggunaan anggaran publik. Hal ini meminimalkan kesalahan dalam perencanaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, layanan publik berbasis teknologi informasi membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Berbagai aplikasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi memungkinkan evaluasi kinerja ASN secara berkala, objektif, dan transparan. Dengan demikian, para ASN terdorong untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan produktif. Selain itu, teknologi digital juga memfasilitasi peningkatan kapasitas ASN melalui program pelatihan daring dan sertifikasi yang lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja.

Meskipun demikian, implementasi teknologi digital di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Jaringan internet yang belum stabil serta minimnya akses terhadap perangkat teknologi menjadi penghalang utama dalam optimalisasi layanan publik berbasis digital. Akibatnya, pelayanan e-government yang direncanakan tidak berjalan maksimal dan belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah daerah juga menjadi tantangan serius. Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk mengoperasikan sistem e-government atau aplikasi layanan publik. Keterbatasan ini berpotensi menghambat inovasi dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi yang masih kental dengan budaya kerja konvensional juga memperlambat penerimaan teknologi baru.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dan terintegrasi. Pertama, pemerintah daerah harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi seperti perluasan jaringan internet, pengadaan perangkat teknologi yang memadai, serta penguatan keamanan sistem digital. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi digital. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan literasi digital secara berkala bagi para aparatur sipil negara. Program-program pelatihan ini harus dirancang secara praktis dan aplikatif, sehingga ASN dapat menguasai penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi publik.

Ketiga, diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan transformasi digital di tingkat daerah. Pemerintah pusat harus mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait

standar e-government dan layanan publik berbasis teknologi. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memberikan insentif dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan teknologi digital secara efektif dan inovatif.

Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi digital melalui e-government dan layanan publik berbasis teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Selain itu, melalui inovasi digital yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan kapasitas pemerintah daerah dapat didorong melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti implementasi e-government dan layanan publik berbasis teknologi informasi. Teknologi digital memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, pengambilan kebijakan berbasis data, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang diberikan yaitu pertama, peningkatan infrastruktur teknologi dimana Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai. Kedua, pelatihan dan peningkatan literasi digital yaitu pemerintah daerah harus menyelenggarakan pelatihan rutin untuk meningkatkan.

DAFTAR REFERENSI

. S., & Sahputri, R. A. M. (2023). Decentralisation and Human Development in Indonesia: The Importance of Local Government Capacity in Delivering Development Outputs and Outcomes. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *21*(2), 393–419. https://doi.org/10.4335/21.2.393-419(2023)

Choi, N. (2021). Analyzing Local Government Capacity and Performance: Implications for Sustainable Development. *Sustainability*, *13*(7), 3862. https://doi.org/10.3390/su13073862

Decentralization in Public Policy and Governance of Public Services in Alaska, USA. (2023). *Journal of Public Policy & Governance*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.53819/81018102t5165

EDOUN, E. ., RAMEETSE, V. K., & POOE, S. (2023). CAPACITY BUILDING AS A TOOL FOR EFFECTIVE LOCAL GOVERNANCE IN SOUTH AFRICA. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, *29*, 111–121. https://doi.org/10.47743/jopafl-2023-

29-10

Espiritu, P. G., Manzon, R. D., & Florencondia, N. (2023). Digital Transformation Adoption in the Local Government Unit (LGU) of the Science City of Muñoz, Nueva Ecija: the Challenges and Best Practices. *The QUEST: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *2*(3). https://doi.org/10.60008/thequest.v2i3.137

Hoesein, Z. A., Arifudin, A., & Rahayu, S. D. (2022). The Effectiveness of Decentralization Policy in Local Government Administration. *Jurnal Akta*, *9*(2), 242. https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.23544

Ilhami, I., Aulia Akhmad, Iammillah, A., Rahmawati, E., Juniasari, J., Lestari, L. A., Akbar, M. J., Najah, N. S., Hafizah, N. N., Safitri, N. O., Fauziah, P. K., Aprianda, R., Ardian, R., Prasetyo, T., & Wardani, Y. K. (2024). Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Tinjauan Islam. *Economic Reviews Journal*, *3*(2), 1436–1443. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.233

Katelo, I. (2024). Public administration and public services analysis and development trends: a review. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, *12*(1), 195–208. https://doi.org/10.9770/jesi.2024.12.1(14)

Muhtadin, M. (2023). Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *AHKAM*, *2*(2), 233–251. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1029

Mulyani, S., Kurniawan, E. D., Hariono, D., Yosrizal, Y., Zurrahman, Z., & Marlissawaty, F. (2024). DECENTRALIZATION DYNAMICS: ASSESSING LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN LINGGA. *PENANOMICS: International Journal of Economics*, *3*(2). https://doi.org/10.56107/penanomics.v3i2.181

Salmon, H., & Lekipiouw, S. (2024). Division Construction Government Authority In Law Number 23 of 2014. *Journal of Ecohumanism*, *3*(4), 664–674. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3516

Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, *10*(12), 323. https://doi.org/10.3390/economies10120323

Suparjana, & Suparjana. (2019). Decentralisation Policy to Strengthen Local Government Capacity in Sumedang Regency, West Java Province, Indonesia. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.33